

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN NOMOR 12/PERMEN-KP/2020 TENTANG
PENGELOLAAN LOBSTER, KEPITING DAN
RAJUNGAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi di Tanjung Setia Kabupaten Pesisir Barat)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh:

ELISA EFRIYANI

NPM. 1621020179

Jurusan : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iiyyah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1442 H/2020 M**

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN NOMOR 12/PERMEN-KP/2020 TENTANG
PENGELOLAAN LOBSTER, KEPITING DAN
RAJUNGAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi di Tanjung Setia Kabupaten Pesisir Barat)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh:

ELISA EFRIYANI

NPM. 1621020179

Jurusan : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iiyyah)

Pembimbing I : Prof, Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag.

Pembimbing II : H. Rohmat, S.Ag., M.HI.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1442 H/2020 M**

ABSTRAK

Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah laut yang dapat dikelola sebesar 5,8 juta km² yang memiliki keanekaragaman sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar. Dalam fiqh siyasah masalah ini juga masuk dalam lingkup Siyasah Tanfidziyah. Siyasah Tanfidziyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah pelaksanaan perundang-undangan Negara. secara tidak langsung juga islam melarang penangkapan Benir Lobster dan juga menegaskan bahwa perilaku ini termasuk tindak kriminal. Beberapa tahun terakhir yakni dari tahun 2017 kegiatan ekonomi ini menjadi pusat perhatian karena telah terjadi proses pemanfaatan sumber daya laut yaitu Lobster yang melampaui kemampuannya.

Dari latar belakang yang penulis jelaskan, rumusan masalah yang akan dipecahkan oleh penulis yaitu bagaimana implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020 terhadap penangkapan Benih Lobster di pantai Tanjung Setia Kabupaten Pesisir Barat dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020 terhadap penangkapan Benih Lobster di pantai Tanjung Setia Kabupaten Pesisir Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020 terhadap penangkapan Benih Lobster dan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam tentang Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020 terhadap penangkapan Benih Lobster.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field reasearch*) dengan penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan sumber data primer (diperoleh langsung dari lapangan) dan data sekunder (buku, jurnal dsb.) dan metode pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisa data dilakukan dengan kualitatif dengan metode berfikir Induktif.

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020 berisikan aturan tangkap Lobster, Kepiting dan Rajungan, berdasarkan hasil wawancara diketahui masih ada sebagian nelayan yang masih melakukan penangkapan yang tidak sesuai dengan peraturan tersebut seperti penangkapan benih Lobster yang ada di pantai Tanjung Setia Kabupaten Pesisir Barat. Dalam Hukum Islam dianjurkan memanfaatkan apa yang ada disekitar manusia, namun pemanfaatan itu dibatasi oleh hak dan melarang untuk membuat kerusakan. Oleh karena itu praktik penangkapan dan penjualan benih Lobster dilihat dalam hukum itu dilarang karena masih banyak nelayan tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Letkol. Hendro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Tlp (0721) 703260

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elisa Efriyani
NPM : 1621020179
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: Implementasi Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020 Tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting dan Rajungan Perspektif Hukum Islam (Studi Di Tanjung Setia Kabupaten Pesisir Barat). Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 9 November 2020
Penulis,



Elisa Efriyani
NMP. 1621020179



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Letkol. Hendro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Tlp (0721)703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Menteri Kelautan Dan
Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020
Tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting dan
Rajungan Perspektif Hukum Islam (Studi Di
Tanjung Setia Kabupaten Pesisir Barat)**

Nama : Elisa Efriyani

NPM : 1621020179

Jurusan : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iiyyah)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang
Munaqosah Fakultas Syari'ah Universitas Islam
Negeri Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag.

H. Rohmat, S.Ag., M.HI

NIP. 195904161987031002

NIP. 197409202003121003

**Mengetahui
Ketua Jurusan Siyasah**

Frenza, M.S.I

NIP. 19800315200911017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Letkol. Hendro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Tlp (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : Implementasi Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020 Tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting dan Rajungan Perspektif Hukum Islam (Studi Di Tanjung Setia Kabupaten Pesisir Barat), oleh: Elisa Efriyani, NPM: 1621020179, Jurusan: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah), telah di ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah pada Hari/Tanggal:

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag

Sekretaris : Hendriyadi, S.H.I., M.H.I.

Penguji Utama : Dr. Jayusman, M.Ag.

Penguji I : Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag.

Penguji II : H. Rohmat, S.Ag., M.HI



Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah
Dr. I. Khoirudin, M.H.
NIP. 196210211993031002

MOTTO

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ
بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾
(الروم : ١٤)

*“Telah tampak kerusakan didarat dan dilaut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali(ke jalan yang benar)”.
(Q.S. Ar-Rum ayat 41)*

PERSEMBAHAN

Allhamdullilah Hirhabbil 'Alamin dengan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Setelah sekian banyak proses yang panjang akhirnya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Untuk melewati proses ini tidaklah mudah tanpa adanya dukungan serta do'a dari orang-orang yang sangat penulis sayangi. Skripsi ini kupersembahkan sebagai bentuk dari ungkapan rasa syukur dan terima kasih yang sangat mendalam kepada:

1. Kedua orang tuaku Bapak Bahyan dan Ibu Pirma Yuli yang telah banyak berjuang dan mendoakan serta selalu memberikan semangat demi tercapainya cita-citaku.
2. Kakakku Iryadi Rasefta, Almarhumah Novita Andri Yani dan adikku Yogi Ade Purnama Yang Selalu Mendoakan Dan Memberikan Dorongan Demi Keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Sanak familiku yang senantiasa memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung.
4. Seluruh dosen UIN Raden Intan Lampung dan khususnya kepada dosen Fakultas Syari'ah yang selalu ilmunya kepada penulis dengan ikhlas.
5. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing penulis dalam berfikir dan bertindak.

RIWAYAT HIDUP

Elisa Efriyani, dilahirkan di Kota Raja pada tanggal 18 Maret 1998, anak ketiga dari pasangan Bahyan dan Pirmayuli. Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Way Jambu selesai tahun 2010, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Pesisir Selatan selesai tahun 2013, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Ngambur selesai pada tahun 2016 dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 Tahun akademik 2016/2017.

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT atas berkat, nikmat dan karunia-Nya yang telah memberikan penjelasan serta penerangan kepada hambanya yang tidak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir Pendidikan Strata Satu (S1) dalam rangka menyelesaikan Skripsi guna mendapatkan gelar sarjana yang penulis beri judul “Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting dan Rajungan Perspektif Hukum Islam (Studi Tanjung Setia Kabupaten Pesisir Barat)”. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, yang Insyaallah mendapat syafaat di hari akhir, amiin.

Dalam menyelesaikan Skripsi penulis menyadari banyak dukungan serta bantuan dari berbagai pihak, dengan demikian tanpa mengurangi rasa hormat maka penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mohammad Mukri., M.Ag. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Bapak Dr. KH. Khoirudin Tahmid, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku ketua jurusan Siyasah Syar’iyyah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung
4. Bapak Prof. Dr. H. Mohammad Mukri., M.Ag. Selaku Pembimbing I dan Bapak H. Rohmat, S.Ag., M.HI. Selaku

Pembimbing II yang telah banyak membimbing dengan penuh kesaaran dan dorongan serta motivasi kepada saya

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah beserta Staf Karyawan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran selama penulis duduk dibangku kuliah hingga selesai
6. Kedua orang tuaku Bapak Bahyan dan Ibu Pirma Yuli yang telah banyak berjuang dan mendoakan serta selalu memberikan semangat demi tercapainya cita-citaku.
7. Para Nelayan dan Bapak Kepala Desa Tanjung Setia, beserta Bapak Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Barat, yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini
8. Sahabat-sahabat Siyasa Syar'iyyah D angkatan 2016, terutama Diah Ayu Ekawati dan Eni Marlina yang selalu mendorong dan memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi dari awal hingga akhir sampai terselesaikannya skripsi
9. Temanku Agus Setiawan yang sudah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini
10. Almamater Tercinta UIN Raden Intan Lampung

Semoga kebaikan yang telah diberikan akan mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Penulis menyadari serta jauh dari kesempurnaan, mengingat keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan skripsi ini kedepan. Hasil karya yang sederhana ini, semoga bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi siapa saja yang memerlukan.

Akhirnya hanya kepada Allah lah kita harapkan segala keridhaan-Nya atas segala pengorbanan dan pengabdian kita, serta ampunan-Nya atas segala kekurangan dan kesalahan

Bandar Lampung 16 Juni 2020
Penulis

Elisa Efriyani
NPM 1621020179

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Fokus Penelitian	7
E. Rumusan Masalah	8
F. Tujuan Penelitian	8
G. Signifikansi Penelitian	9
H. Metode Penelitian	9

BAB II LANDASAN TEORI

A. Teori Fiqh Siyasah	17
1. Pengertian Fiqh Siyasah Tanfidziyah	18
2. Bentuk-bentuk Kekuasaan al-sulthah al-Tanfidziyah ..	19
B. Alam Dalam Islam	24
1. Pengertian Sumber Daya Alam	24
2. Ruang Lingkup Sumber Daya Alam	24
3. Macam-macam dan Sifat Sumber Daya Alam	27
4. Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dalam Islam	33
5. Hak Kepemilikan Sumber Daya Alam	42
6. Hak Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dalam Islam ..	45
C. Tinjauan Pustaka	55

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	59
1. Sejarah Desa Tanjung Setia	59
2. Kondisi Demografi	62
3. Keadaan Ekonomi	62

4. Keadaan Sosial	63
5. Keadaan Keagamaan	63
6. Batas Wilayah	64
7. Tata Guna Lahan	64
8. Mata Pencanharian	65
B. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 12/PERMEN-KP/2020	66
C. Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020 Khusus Lobster di pantai Tanjung Setia Kabupaten Pesisir Barat.....	71

BAB IV ANALISI DATA

A. Pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020 Tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting dan Rajungan di Pantai Tanjung Setia Kabupaten Pesisir Barat	79
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020	83

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	91
B. Rekomendasi	92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Proposal ini berjudul “ **Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020 Tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan Perspektif Hukum Islam (Studi di Tanjung Setia Kabupaten Pesisir Barat)**”. Sebelum menguraikan pembahasan penelitian dengan judul tersebut, terlebih dahulu akan dijelaskan berbagai istilah yang terdapat pada penelitian ini agar tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi pembaca. Dalam penegasan judul ini akan dijelaskan secara umum cakupan penelitian serta membatasi arti kalimat dalam penulisan agar makna yang dimaksud dapat digambarkan dengan jelas.

1. Implementasi menurut KBBI pelaksanaan atau penerapan. Secara umum implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang).¹
2. Dalam 12/PERMEN-KP/2020 : “Penangkapan dan/atau pengeluaran Lobster (*Panulirus spp*), di atau dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan:

¹ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Bandung : CV Sinar Baru, 2002), h. 70.

- a. Tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada *Abdomen* luar dan ukuran panjang karapas di atas 6 (enam) cm atau berat di atas 150 (seratus lima puluh) gram per ekor untuk Lobster pasir (*Panulirus homarus*) atau.
 - b. Tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada *Abdomen* luar dan ukuran panjang karapas di atas 8 (delapan) cm atau berat di atas 200 (dua ratus) gram per ekor untuk Lobster jenis lainnya”.²
3. Hukum Islam adalah (*al-adillah al-syar’iyyah al-islamiyyah*), atau dalil syar’i adalah rujukan pengambilan keputusan untuk menghukum suatu perbuatan dalam syariat islam dengan cara dibenarkan. Hukum islam juga disebut hukum-hukum Allah SWT, yang berkewajibannya telah diatur secara jelas dan tegas didalam Al-Qur’an atau hukum-hukum yang ditetapkan secara langsung oleh wahyu.³

Berdasarkan data di atas dapat diperjelas bahwa yang dimaksud dalam judul ini dimana penangkapan benih Lobster di Tanjung Setia yang dilakukan nelayan sejak tahun 2017 adalah sebuah penelitian untuk menganalisis secara mendalam tentang Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020 Tentang Pengelolaan Lobster,

² 12/PERMEN-KP/2020 Pasal 2

³ Siti Mahmudah, *Historisitas Syari’ah Kritik Relasi –Kuasa Khalil Abd Al-Karim* (Yogyakarta : LKIS Printing Cemerlang, 2016), h. 197.

Keiting, dan Rajungan Perspektif Hukum Islam di Tanjung Setia Kabupaten Pesisir Barat.

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Objektif

Masih maraknya penangkapan Benih Lobster yang ada di perairan Pesisir Barat khususnya pantai Tanjung Setia meskipun sudah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020 Tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*) dan Rajungan (*Portunus Pelagicus*).

2. Alasan Subjektif

- a. Data dan literatur yang mendukung pembahasan skripsi ini cukup tersedia, sehingga skripsi ini mampu diselesaikan tepat pada waktunya
- b. Masalah yang sedang dibahas dalam kajian ini sesuai dengan jurusan yang sedang penulis dalam, yaitu Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*).

C. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah laut yang dapat dikelola sebesar 5,8 juta km² yang memiliki keanekaragaman sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar.⁴

⁴Pemerintah Kabupaten Selayar Dinas Kelautan dan Perikanan, *Laporan Akhir Workshop Kabupaten Pengembangan Perdes* (ECO : Natural Society, 2006), h. 9.

Dalam fiqh siyasah masalah ini juga masuk dalam lingkup Siyasah Tanfidziyah. Siyasah Tanfidziyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah pelaksanaan perundang-undangan negara. Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut.⁵

Sebenarnya secara tidak langsung juga Islam melarang penangkapan Benur Lobster dan juga menegaskan bahwa perilaku ini termasuk tindak kriminal. Karena penangkapan Benir Lobster merupakan tindakan yang bersifat eksploitasi dan bisa merusak ekosistem laut. Islam muncul sebagai agama yang senantiasa menyeru umat manusia untuk berbuat kebaikan, kebenaran, dan senantiasa meninggalkan kemungkaran. Oleh karena itu, Islam selain agama monoteisme juga merupakan agama yuridis, Islam senantiasa mengkonstruksikan kerangka nilai dan norma tertentu pada umatnya, agar selalu bertindak serta berperilaku berdasarkan pada tata aturan hukum yang telah disepakati. Tata aturan hukum dalam islam tersebut adalah ketentuan-ketentuan hukum yang didapat dari Al-Qur'an dan hadist yang disebut dengan Syar'i.

Secara umum, tujuan syar'i dalam mensyari'atkan hukum-hukumnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokok (*daruri*) bagi

⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Prenamedia Group, 2014), h.230.

manusia, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan (*hajiyyat*) dan kebaikan-kebaikan manusia (*tahsiniyyat*) sehingga terwujudlah kemaslahatan manusia.⁶ Sebagaimana firman Allah SWT :

وَلَا تَعْتَوُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (هود : ٥٨)

Artinya:

“Dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan” (Q.S. Hud : 85)⁷

Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya perikanan telah diamankan dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, yang menyatakan dengan tegas bahwa pengelolaan perikanan ditujukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan.⁸

Selain Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, juga mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020 Tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*) dan Rajungan (*PortunusPelagicus spp*), dimana Peraturan Menteri tersebut diterbitkan sebagai tindakan preventif untuk memberikan pembatasan penangkapan serta menjaga kelestarian ketiga jenis spesies tersebut agar dapat dinikmati dalam jangka

⁶ Abdul Wahhab Khallaf *‘Ilmu Ushul Fiqh*, Cet. 1, alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, (Semarang : Dina Utama, 1994) hlm. 310.

⁷ Qur'an Terjemahan

⁸ Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

panjang. Pembatasan penangkapan tersebut tercantum dalam pasal 2 yang berbunyi :“Penangkapan dan/atau pengeluaran Lobster (*Panulirus spp*), di atau dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan:

- a. Tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada *Abdomen* luar dan ukuran panjang karapas diatas 6 (enam) cm atau berat diatas 150 (seratus lima puluh) gram per ekor untuk Lobster pasir (*Panulirus homarus*) atau.
- b. Tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada *Abdomen* luar dan ukuran panjang karapas diatas 8 (delapan) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor untuk Lobster jenis lainnya ”

Salah satu indikator atas diterbitkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020 dalam menjamin kelestarian ketiga jenis spesies tersebut di berbagai daerah khususnya di pantai Tanjung Setia Kabupaten Pesisir Barat masih banyak nelayan melakukan penangkapan Lobster dalam kondisi bertelur maupun dalam ukuran kecil. Maraknya kejadian tersebut didorong oleh mahalnya harga jual benih Lobster serta kurang serius penegak hukum dalam menangani permasalahan ini. Penangkapan benih Lobster itu sendiri merupakan salah satu mata pencahariaan para nelayan di wilayah tersebut, selain hasil yang diperoleh mengutungkan dengan harga yang dijanjikan oleh pihak pengepul itu sendiri dibandingkan dengan harga penjualan di dalam negeri. Untuk per ekor benih Lobster itu sendiri senilai Rp. 5.000 hingga 20.000 per ekornya.

Beberapa tahun terakhir yakni dari tahun 2017 kegiatan ekonomi ini menjadi pusat perhatian karena telah terjadi proses pemanfaatan sumber daya laut yaitu Lobster yang melampaui kemampuannya. Eksploitasi yang tidak diimbangi dengan pemahaman akan keberlanjutan biota laut sehingga menjadi permasalahan tersendiri bagi kelangsungan biota itu sendiri, sehingga di beberapa daerah pesisir khususnya Kabupaten Pesisir Barat telah mendekati pemanfaatan maksimum (*over fishing*) yaitu keadaan dimana tingkat pemanfaatan telah mendekati kondisi yang memprihatinkan bagi kelestarian biota Lobster.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti ingin mengetahui dan meneliti lebih lanjut mengenai Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020 Tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan Perspektif Hukum (Studi di Tanjung Setia Kabupaten Pesisir Barat).

D. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah untuk meneliti Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020 Tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting dan Rajungan Khusus Lobster Perspektif Hukum Islam di Tanjung Setia Kabupaten Pesisir Barat.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020 terhadap penangkapan Benih Lobster di pantai Tanjung Setia Kabupaten Pesisir Barat ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020 terhadap penangkapan Benih Lobster di pantai Tanjung Setia Kabupaten Pesisir Barat ?

F. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020 terhadap penangkapan Benih Lobster di pantai Tanjung Setia Kabupaten Pesisir Barat ?
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam tentang Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020 terhadap penangkapan Benih Lobster di pantai Tanjung Setia Kabupaten Pesisir Barat ?

G. Signifikansi Penelitian

1. Secara Teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi pembaca mengenai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, dapat memperkaya khazanah keilmuan dan wawasan dalam penelitian ilmiah sebagai wujud dari disiplin ilmu yang dipelajari dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya Hukum Tata Negara dan politik (Siyasah) dan salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana hukum di fakultas syari'ah dan hukum UIN Raden Intan Lampung.
2. Secara Praktis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pemikiran yang positif bagi peneliti dan khususnya bagi pembaca pada umumnya yaitu tentang Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020 Tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan Perspektif Hukum Islam Studi di Tanjung Setia Kabupaten Peisir Barat.

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, mengelola dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan tersebut. Maka penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan Penelitian Lapangan (*Field research*). Penelitian lapangan dilakukan untuk kaneah kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan.⁹

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, Penelitian ini adalah penelitian Deskriptif, artinya peneliti yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.¹⁰ Sifat penelitian yang digunakan Deskriptif Analisis yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang disusun, dijelaskan, diimpresmentasikan kemudian disimpulkan.

⁹ Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 10.

¹⁰ Sariyuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h.7.

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen/anggota dari seluruh wilayah yang menjadi sasaran peneliti¹¹ atau keseluruhan objek peneliti, unit atau manusia, dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah para nelayan di pantai Tanjung Setia berjumlah 150 orang, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat adalah 10 orang dan Kepolisian Perairan adalah 20 orang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang hendak digeneralisasikan. Sampel yang dipakai dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*. Penentuan sampel dalam teknik ini dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel.¹² Adapun yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah :

- 1) Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat, yang turut aktif dalam menyelenggarakan urusan bidang

¹¹ Juliansyah, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 147.

¹² *Ibid*, h. 155.

kelautan dan perikanan. Adapun jumlah sampelnya adalah sebanyak 2 orang.

2) Para nelayan untuk di pekan Tanjung Setia Kabupaten Pesisir Barat jumlah nelayan adalah 150 orang. Menurut Suharsimi Arikunto (20013:108) “Sampel adalah sebagian atau populasi yang diteliti. Apabila subjek kurang dari 100 lebih baik diambil semua. Jika subjeknya lebih dari 100 dapat diambil 10-15%” Berdasarkan pendapat diatas penulis mengambil sampel sebesar 10% dari 150 populasi. Dengan demikian jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 15 orang nelayan.

3) Kepoisian Perairan yang ikut serta dalam menjaga keamanan dan penegakkan hukum diwilayah perairan Kabupaten Pesisir Barat. Adapun jumlah sampelnya adalah 3 orang. Jumlah sampel semuanya adalah 2 orang + 15orang + 3 orang = 20 orang

3. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data-data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian. Sumber data primer ini diperoleh dari sumber informan yaitu individu atau perorangan seperti hasil *Interview* (wawancara) yang dilakukan oleh

peneliti. Dalam penelitian ini dilakukan di pantai Tanjung Setia Kabupaten Pesisir Barat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau yang dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.¹³ Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan (*Library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan maksud untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip, dan menelaah literatur-literatur yang menunjang, peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

4. Alat Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan observasi, sesuai dengan tujuan empiris.¹⁴ Observasi dilakukan di Tanjung Setia Kabupaten Pesisir Barat.

¹³ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 58.

¹⁴ Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Indan Lampung, 2015), h. 114.

b. *Interview* (Wawancara)

Interview (Wawancara) adalah suatu percakapan tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara pisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu.¹⁵ Wawancara ini dimaksud untuk memperoleh data dalam penelitian. Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara tak berstruktur dengan beberapa orang yang memang berkapasitas dan patut untuk dimintai keterangan mengenai permasalahan yang peneliti ambil, cara ini dilakukan agar mudah untuk mencapai tujuan.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber informasi khusus dari karangan atau tulisan, jurnal, buku, undang-undang dan sebagainya.¹⁶ Dokumentasi yang digunakan peneliti terkait dengan pokok masalah yang peneliti ambil. Dokumen bisa berupa data-data dari Dinas Perikanan ataupun data dari lembaga-lembaga yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh peneliti.

¹⁵ Kartini Kartono,..... h.187.

¹⁶ Suhar Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h.231

d. Teknik Pengelola Data

Data-data yang telah terkumpul diolah dengan cara:

- 1) Pemeriksaan Data (*Editing*) yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan karena kemungkinan data yang terkumpul itu tidak logis dan memeriksa ulang kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut diteliti.
- 2) Rekontruksi Data (*Reconstructing*) yaitu menyusun ulang secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami sesuai permasalahan kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian.¹⁷

5. Analisis Data

Setelah data diperoleh kemudian dilakukan analisis data. Adapun metode yang digunakan dalam analisis adalah metode kualitatif yaitu apabila data yang terkumpul hanya sedikit, bersifat monografis atau wujud kasus-kasus (sehingga tidak dapat disusun dalam struktral klasifikasi), maka analisisnya bersifat deskriptif kualitatif, selanjutnya analisa yang dilakukan akan ditarik kesimpulan terakhir guna memberi jawaban terhadap masalah yang berkaitan dengan implementasi

¹⁷ Amiruddin dan Zainal Arifin Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 107.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020. Setelah semua data terkumpul, penulis mengambil kesimpulan dari seluruh pembahasan dengan cara berpikir Induktif yaitu dimulai dari fakta yang bersifat khusus dan kongkret, ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifats umum.¹⁸

¹⁸Louis Goot Schalk, *Understanding Story, A. Primer Of Histirical*, Terjemahan Nugroho Notosusanto (Jakarta : UI Press, 1995), h. 32.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Fiqh Siyasah

Kata *fiqh* berasal dari *faqaha-yafquhu-fiqhan*. Secara bahasa pengertian *fiqh* adalah “paham yang mendalam”.¹⁹ *Fiqh* secara etimologis adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembaca, atau paham yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.²⁰ Secara terminologis *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenal amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang fashil (terperinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, Al-qur'an dan sunnah).²¹

Kata “*siyasah*” yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.²² *Siyasah* menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti

¹⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta : Prenamedia Group, 2014), h. 2.

²⁰ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta : Raja Grafindo, 1994), h. 21

²¹ Ibid, h. 22.

²² Muhammad Iqbal,..... h. 3.

yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik.

Siyasah secara terminologis dalam lisan al-Arab, *siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Dari uraian tentang *fiqh* dan *siyasah* maka dapat ditarik kesimpulan yakni, *fiqh siyasah* adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada. Ruang lingkup Fiqh Siyasah mencakup *Siyasah Dusturiyyah*, *Siyasah Maliyah*, *Siyasah Qadlaiyyah*, *Siyasah Tanfidziyyah*, dan *Siyasah Dauliyyah*.

1. Pengertian *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah*

Siyasah Tanfidziyyah adalah tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyyah*). Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan

tuntunan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijakan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nashsh dan kemaslahatan.²³

2. Bentuk-bentuk Kekuasaan *al-sulthah al-Tanfidziyah*

a. Imamah/Imam

Dalam fiqh siyasah, kata Imamah biasanya diidentifikasi dengan khilafah. Keduanya menunjukkan pengertian kepemimpinan tertinggi dalam negara Islam. Istilah Imamah banyak digunakan oleh kalangan Syi'ah, sedangkan istilah khilafah lebih populer penggunaannya dalam masyarakat Sunni.

Imamah berasal dari kata umat, jamaknya umam yang artinya umat, rakyat atau bangsa. Dalam bahasa Inggrisnya disebut *nation, people*. Jadi imam berarti pemimpin atau orang yang di depan. Kata imam dalam bahasa Arab tidak menunjukkan arti kesucian hidup, dan imam adalah orang yang mempunyai pengikut, baik dia shaleh

²³ Muhammad Iqbal,..... h. 158.

maupun tidak.²⁴ Seperti diisyaratkan dalam QS. Al-Anbiya' ayat 73 berikut :

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ
الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا
عَبِيدِينَ (الأنبياء : ٣٧)

Yang artinya : *“Dan Kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan Kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan shalat, dan menunaikan zakat, dan hanya kepada Kami mereka menyembah”*²⁵

Dengan demikian, secara harfiyah imam artinya pemimpin yang memiliki pengikut yang tidak dibatasi oleh ruang, waktu dan tempat. Imamah menurut doktrin Syi'ah adalah tentang kepemimpinan politik dan spiritual dalam khilafah yang harus dipegang oleh salah seorang imam dari keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib setelah Nabi Muhammad Meninggal. Sebab keluarga Nabi saw menghendaki dari keluarganya yakni Ali bin Abi Thalib. Namun disaat mereka sibuk mengurus

²⁴ *Ibid*, h. 149.

²⁵ Qur'an Terjemahan.

jenazah Nabi, Abu Bakar sudah dibai'at menjadi khalifah, sehingga mereka tidak sempat mengikuti pembai'atan itu. Karena itu keluarga Nabi saw tersebut tidak segera berbai'at kepada Abu Bakar. Walaupun begitu pada akhirnya mereka tidak boleh tidak membai'atnya juga.²⁶

b. *Khilafah/Khalifah*

Khilafah dalam terminologi politik Islam adalah sistem pemerintahan Islam yang meneruskan sistem pemerintahan Rasulullah saw dengan segala aspeknya yang berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. Sedangkan *khalifah* adalah pemimpin tertinggi umat Islam sedunia, atau disebut juga dengan *imam a'zham* yang sekaligus menjadi pemimpin negara Islam sedunia atau disebut dengan *khalifat al-muslim*.

c. *Imarah/Amir*

Imarah merupakan *ma dar* dari *mira* yang berarti ke' miraan atau pemerintahan. Kata *mir* bermakna pemimpin. Istilah *mir* di masa khulafaurrasyidin digunakan sebagai gelar bagi penguasa daerah atau gubernu, juga sebagai komandan militer (*mir al-jaisy*), serta bagi jabatan-

²⁶ Absul Syukur al-Aziz, *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-jejak Peradaban di Barat dan di Timur* (Yogyakarta : al-Saufa, 2014), h. 117.

jabatan penting, seperti *Amirul Mukminin*, *Amirul Muslimin*, *Amirul al-Umar*. Sedangkan dalam kamus inggris diartikan sebagai “orang yang memerintah, komandan, kepala dan raja”. Berdasarkan makna-makna tersebut, *mir* didefinisikan sebagai seorang penguasa yang melaksanakan urusan.

Secara umum penggunaan kata Amir yang berarti pemimpin komunitas muslim muncul dalam pertemuan di balai aqifah Bani Sa'idah. Gelar *Mirul Mukminin* diselamatkan pertama kali kepada khalifah Umar bin Al-Khattab. Pada era Abbasiyah banyak mir membatasi hubungan dengan pemerintah pusat (*khalifah*) dan mendirikan dinasti-dinasti kecil yang berdaulat, seperti dinasti ulun.²⁷

d. Wizarah/Wazir

Kata *wizarah* diambil dari kata *al-wazr* yang berarti *al-tsuql* atau berat. Dikatakan demikian karena seorang *wazir* memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat. Kepadanyalah dilimpahkan sebagian kebijaksanaan pemerintahan dan pelaksanaannya. Dalam bahasa Arab dan Persia modern, wazir mempunyai pengertian yang sama dengan menteri yang mengepalai departemen dalam

²⁷*Ibid*, h. 229.

pemerintahan. Dalam *First Encyclopedia of Islam* disebutkan bahwa kata wizarah atau wazir ini diadopsi dari bahasa Persia. Menurut kitab *Zend Avesta*, kata ini berasal dari “*vicira*” yang berarti orang yang memutuskan, hakim. Dengan pengertian ini maka wazir adalah nama suatu kementerian dalam sebuah negara atau kerajaan, karena pejabat yang mengepalainya berwenang memutuskan suatu kebijaksanaan publik demi kepentingan rakyat, negara, atau kerajaan yang bersangkutan.²⁸ Ada dua macam wazir yaitu sebagai berikut :

1. *Wizarah al-Tafwidziyah* (Kementerian Delegatori)

Adalah wazir yang disertai tugas/wewenang tentang pengaturan urusan-urusan (Negara dan pemerintahan) berdasarkan pikiran dan ijtihad para wazir sendiri maupun mengikuti pendapat para hakim. Akan tetapi juga berhak menangani kasus kriminal (mazalim) baik langsung maupun mewakilkan kepada orang lain. Selain itu juga berhak memimpin perang. Dengan kata lain kewenangan kewenangan imam juga kewenangan wazir, kecuali tiga hal : pertama,

²⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, h. 166.

penentuan putra mahkota. Kedua, imam berwenang mencopot orang yang ditunjuk wazir, sedangkan wazir tidak dapat mencopot orang yang ditunjuk imam. Ketiga, imam boleh mengundurkan diri dari imamah.²⁹

2. *Wizarah al-Tanfidiyah* (Kementerian Pelaksana)

Adalah wazir yang hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh imam dan menjalankan apa yang telah diputuskan oleh imam. Prinsipnya harus mematuhi dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh khalifah, selain itu ia harus memenuhi beberapa syarat.³⁰

B. Alam Dalam Islam

1. Pengertian Sumber Daya Alam (Lingkungan)

Alam (Lingkungan) merupakan karunia dari Allah SWT kepada manusia untuk dijadikan sebagai kelangsungan hidup dan menjadikannya sebagai alat bantu manusia untuk menjaga eksistensi sesama makhluk hidup di muka bumi ini. Allah menciptakan langit, hutan, pohon, angin, sungai dan laut semata-mata agar manusia menggunakannya sesuai dengan kebutuhannya. Allah menciptakan langit dan bumi agar

²⁹*Ibid*, h. 169.

³⁰*Ibid*, h. 170.

lingkungan yang ada di bumi ini dapat bermanfaat bagi manusia serta memberikan amanah kepada manusia untuk menjaga kelestarian lingkungan alam ini dengan cara tidak merusak alam atau eksploitasi yang berlebihan terhadap alam.

Alam atau juga disebut dengan sumber daya alam adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar hidup lebih sejahtera. Sumber daya alam dibagi menjadi dua yaitu sumber daya alam yang hidup (hayati) dan sumber daya alam yang mati (non hayati), kedua sumber daya alam ini dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.³¹ Pemanfaatan sumber daya alam ditentukan berdasarkan kegunaan sumber daya alam tersebut bagi manusia. Oleh karena itu, nilai sumber daya alam ditentukan oleh nilai kemanfaatannya bagi manusia itu sendiri. Misalnya lahan pertanian yang subur dapat dijadikan daerah pertanian yang potensial. Manusia (penduduk) suatu negara merupakan sumber daya bagi negara tersebut karena manusia dapat memberikan manfaat bagi negaranya, seperti tenaga kerja, kemajuan

³¹Yasin Maskoeri, *Ilmu Alamiah Dasar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1986), h.529

ilmu pengetahuan, dan teknologi yang dapat meningkatkan ekonomi negara.³²

2. Ruang Lingkup Sumber Daya Alam

Sumber daya alam mencakup semua pemberian alam baik di bawah maupun di atas bumi baik yang biotik maupun abiotik. Penguasaan sumber daya alam yaitu sebagai konsumsi langsung, masukan untuk pengolahan, konsumsi untuk pengolahan lebih lanjut dan pengelolaan sumber daya alam untuk tujuan bermacam-macam. Sumber daya alam harus dikelola secara luas jangan sampai merusak jenis sumber daya alam yang lain.³³

Secara umum sumber daya alam dapat diklasifikasikan kedalam dua kelompok yaitu:

- a. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yaitu sumber daya alam ini memiliki cadangan terbatas sehingga eksploitasi menghabiskan sumber daya alam.
- b. Sumber daya alam dapat diperbaharui artinya jumlah sumber daya alam berubah sepanjang waktu yaitu berapa jumlah yang dimanfaatkan sekarang mempengaruhi ketersediaan sumber daya alam dimasa mendatang.³⁴

³² Ibid, h. 598.

³³ Karden Eddy Sotang Manik, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Djambatan, 2003), h. 46.

³⁴ Ibid, h. 48.

3. Macam-macam dan Sifat Sumber Daya Alam

Sumber daya alam bukan hanya meliputi jumlah bahan yang ada yang siap untuk diolah dan siap digunakan, akan tetapi sumber daya alam itu bersifat dinamis dan berubah-ubah. Mengenai banyak atau tidaknya nilai suatu sumber daya alam, tergantung pada waktu dan tempat, tingkat teknik dan penemuan-penemuan baru, sikap manusianya terhadap sumber daya alam tersebut, dan perubahan dalam selera baik dalam negeri maupun luar negeri. Perubahan dalam variabel ini menyebabkan negara tersebut akan menjadi lebih buruk sumber daya alamnya meskipun jumlah fisik dari sumber daya alam tersebut tidak buruk.³⁵

Macam-macam sumber daya alam dapat digolongkan sebagai berikut:

a. Sumber daya alam yang tidak dapat habis

Sumber daya alam ini merupakan sumber daya alam yang tidak pernah habis hal itu karena sumber daya alam ini mengalami siklus sepanjang masa. Sumber daya alam ini dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari, misalnya energi sinar matahari, udara, pasang surut air laut, angin dan lain-lain.

³⁵*Ibid*, h. 46.

b. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui

Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah jenis sumber daya alam yang relatif mudah untuk dipulihkan serta waktu yang diperlukan untuk pemuihan pun tidak terlalu lama. Oleh karena itu, pada saat sumber daya alam ini habis, maka dalam waktu dekat sumber daya alam tersebut dapat diperoleh kembali melalui proses pembaharuan secara alami.³⁶ Berikut ini beberapa contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu sebagai berikut:

1. Tumbuh-tumbuhan

Tumbuh-tumbuhan merupakan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi manusia. Tidak hanya tumbuh-tumbuhan saja yang bisa dimanfaatkan oleh manusia tetapi buah yang dihasilkan dari tumbuh-tumbuhan juga sangat bermanfaat bagi manusia. Tumbuhan juga berperan sebagai penghasil oksigen dan penghasil karbohidrat dari proses fotosintesis. Dalam siklus rantai makanan, tumbuhan menempati posisi sebagai produsen yang berperan sebagai penghasil makanan. Oleh karena itu tumbuhan ini dikatakan sebagai

³⁶*Ibid*, h. 49.

sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena pembaharuan tumbuhan ini bisa dilakukan dengan cukup mudah dan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Pembaharuan tumbuhan ini bisa dilakukan dengan penanaman kembali tumbuhan tersebut.

2. Hewan

Hewan merupakan salah satu sumber daya alam karena bermanfaat bagi manusia, yaitu dapat membantu pekerjaan manusia dan sebagai sumber pangan bagi manusia. Hewan dikatakan sebagai sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena pembaharuan hewan dilakukan dengan mudah yaitu dengan cara menternakkan hewan maupun berkembang biak dengan sendirinya.³⁷

3. Air

Air secara umum diketahui sangat dibutuhkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu air merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena dalam pembaharuan air cukup mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama, karena air mempunyai siklus tersendiri, sehingga air

³⁷ Salim HS, *Hukum Pertambangan*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2012), h.258.

dikatakan sebagai sumber daya alam yang dapat diperbaharui.³⁸

4. Tanah

Tanah merupakan sumber daya alam yang sangat bermanfaat bagi manusia, yaitu sebagai tempat tinggal manusia. Tanah dikatakan sebagai sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena pembaharuan tanah sangat mudah yakni terbentuk dari sisa-sisa jasad makhuk hidup yang sudah mati.³⁹

c. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui

Jenis atau klasifikasi sumber daya alam menurut sifatnya yang selanjutnya adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam ini adalah kebalikan dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yaitu jenis sumber daya alam yang apabila persediaanya habis maka untuk menyediakannya kembali akan sangat sulit membutuhkan waktu yang sangat lama, atau mungkin bahkan tidak dapat disediakan lagi. Proses penyediaan kembali sumber daya alam ini membutuhkan waktu yang sangat lama, apabila kondisi lingkungan memungkinkan. Sumber daya

³⁸ Moh. Soerjani, Rofik Ahmad, dan Rozy Munir, *Lingkungan: Sumber Daya Alam Dan Kependudukan Dalam Pembangunan* (UI Press, 2008), h. 60.

³⁹ Moh. Soerjani, Rofik Ahmad, dan Rozy Munir,..... h. 239.

alam yang tidak dapat diperbaharui ini jumlahnya sangat banyak, dan seringkali kita memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari.⁴⁰ Berikut ini sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui yaitu :

1. Minyak Bumi

Minyak bumi merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Minyak bumi ini adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh manusia dalam berbagai hal. Oleh karena itu minyak bumi dikatakan sebagai sumber daya alam. Di alam ini minyak bumi jumlahnya sangat terbatas dan tidak dapat diperbaharui. Minyak bumi ini terbentuk dari endapan makhluk mikroorganisme mulai dari zaman purba dan memerlukan waktu hingga jutaan tahun lamanya untuk dapat menjadi minyak bumi.⁴¹

2. Gas Alam

Gas alam atau gas bumi ini termasuk sumber daya alam karena sangat bermanfaat bagi manusia. Gas alam atau gas bumi ini mempunyai peranan atau energi yang dapat digunakan manusia dalam berbagai aktivitas

⁴⁰ Salim HS, *Hukum Pertambangan*,..... h. 259.

⁴¹ *Ibid*, h. 260.

sehari-hari, misalnya untuk pembangkit listrik dan sebagai bahan bakar untuk memasak. Gas alam ini jumlahnya terbatas, dan untuk memperbahruinya pun memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu gas alam dikatakan sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui.

3. Emas

Emas adalah barang tambang yang sangat berharga dan sangat berguna bagi manusia. Emas merupakan jenis batuan alam yang terbantu dari proses alami yang ada di bumi sehingga jumlahnya sangat terbatas. Oleh sebab itu emas dapat dikatakan sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui.

4. Batubara

Batubara tercipta dari pembusukan bagian-bagian dari tumbuhan, sisa tumbuhan yang membentuk gambut yang kemudian mengendap di suatu tempat. Karena adanya suatu tekanan dari penimbunan dan juga adanya gerakan dari tanah, kemudian gambut-gambut tersebut berubah menjadi batubara.

4. Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dalam Islam

Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk memanfaatkan sumber daya alam yang bersifat publik (umum). Sumber daya alam yang bersifat publik ini adalah kekayaan yang menjadi hak milik semua orang atau segolongan manusia, dan hak pemanfaatannya dapat dinikmati oleh mereka semua tanpa monopoli atau eksploitasi secara sepihak untuk kepentingan pribadi. Dengan kata lain, aset publik ini dapat dinikmati oleh seluruh komponen masyarakat atau seluruh anggota kelompok tertentu (yang memilikinya), tanpa ada penyempitan hak pada satu individu.⁴² Namun sumber daya alam bersifat publik ini dibatasi oleh pertanggung jawaban dan kepatuhan kepada syariah. Artinya pemilik hak dilarang menggunakan haknya secara berlebihan atau menyebabkan pelanggaran hak dan dan menyebabkan kerugian terhadap orang lain maupun terhadap hak kepentingan masyarakat masyarakat yang mengakibatkan hukuman penjara (*ta'zir*).

Alam mempunyai eksistensi riil, objek serta bekerja sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku tetap (qadar) bagi alam, atau sering disebut sunatullah. Seluruh alam raya ini diciptakan untuk digunakan oleh

⁴² Husain Husain Syahatah, *Perlindungan Aset Publik Dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005), h. 6.

manusia untuk melanjutkan kehidupan. Hingga tujuan penciptaan manusia itu hanya untuk beribadah kepada Allah. Dan semua yang ada di bumi ini diciptakan Allah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Seperti dalam firman Allah dalam surat An Nahl ayat 14 berikut :

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا
وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ
فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (النحل
: ٤١)

Artinya :”Dan Dialah Allah yang menundukkan lautan (unntukmu) agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar, dan kamu mengeluarkan dari lautan perhiasan yang kamu pakai. Kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya supaya kamu bersyukur.”⁴³

Masalah lingkungan hidup merupakan masalah global yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Lingkungan yang baik dan sehat menjadi barang yang langka dan sulit untuk didapatkan, karena

⁴³ Qur'an Terjemahan.

hampir setiap ruang sudah terjadi kerusakan. Kerusakan lingkungan ini salah satunya disebabkan oleh tingginya nafsu manusia untuk mengambil manfaat dari alam. Padahal Allah menciptakan dan sumber daya alam ini dimaksudkan untuk kemakmuran manusia.⁴⁴ Oleh karena itu manusia seharusnya tidak melakukan perusakan terhadap lingkungan dengan mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan.

Adanya tindakan manusia melakukan eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam diakibatkan oleh adanya pandangan manusia anthroposentris terhadap alam, yang memandang manusia adalah pusat dari alam semesta. Sehingga alam dipandang sebagai objek yang dapat dieksploitasi hanya untuk memuaskan keinginan manusia. Padahal Allah SWT telah mengingatkan manusia dalam QS Ar-Ruum ayat 41 :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي
النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾ (الروم : ١٤)

⁴⁴ Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan, Masalah dan Penanggulangan* (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), h. 4.

Artinya *“Telah tampak kerusakan didarat dan dilaut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”*.⁴⁵

Dari peringatan Allah SWT tersebut, ada dua hal pokok menjadi dasar pandangan Islam dalam isu kerusakan lingkungan.

- a. Islam menyadari bahwa telah dan akan terjadi kerusakan lingkungan baik di daratan maupun lautan yang berakibat pada turunya kualitas lingkungan tersebut dalam mendukung hajat hidup manusia.
- b. Islam memandang manusia sebagai penyebab utama kerusakan dan sekaligus pencegah terjadinya kerusakan tersebut.⁴⁶

Problem lingkungan yang kini dihadapi umat manusia umumnya disebabkan oleh dua hal : pertama, kejadian alam sebagai peristiwa yang harus terjadi sebagai akibat proses dinamika alam. Kedua, peristiwa yang diakibatkan oleh perbuatan manusia. Kedua bentuk kejadian ini mengakibatkan ketidakseimbangan pada ekosistem dan ketidaknyamanan

⁴⁵ Qur'an Terjemahan.

⁴⁶ Emil Salim, *Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi* (Jakarta: Kompas, 2010), h. 217.

kehidupan makhluk hidup baik manusia, tumbuh-tumbuhan maupun hewan. Ketidak seimbangan dan ketidaknyamanan tersebut dalam kader tertentu dapat dikatakan sebagai bencana. Masalah lingkungan akan timbul dari adanya interaksi antara aktivitas ekonomi manusia dan sumber daya alam, yang berawal dari adanya permintaan masyarakat akan barang dan jasa, selanjutnya meningkatnya permintaan sumber daya alam. Melalui kegiatan ekonomi, sumber daya alam yang semakin meningkat dan dilakukan terus menerus tanpa diikuti usaha lain untuk melestarikannya maka daya dukung lingkungan akan menjadi berkurang. Hal ini tentunya memberikan dampak yang cukup serius bagi kelangsungan hidup masyarakat.⁴⁷

Secara prinsip islam tidak melarang manusia untuk memanfaatkan kekayaan alam yang telah Allah SWT sediakan untuk manusia sebagaimana yang telah dimanifestasikan dalam QS. Al-Hijr ayat 19-20

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ
كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ ﴿١٩﴾ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَ وَمَنْ
لَّسْتُمْ لَهُمْ بَرَازِقِينَ (الهمز : ٩١-٢)

⁴⁷ Rokhmin Dahuri, dkk, *Pengelolaan Sumber Daya Alam* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004), h. 42.

Artinya “Dan Kami telah menghamparkan bumi, dan Kami menjadikan kepadanya gunung-gunung, serta Kami tumbuhkan disana segala sesuatu menurut ukuran. Dan Kami telah menjadikan kepadanya sumber-sumber kehidupan, untuk keperluanmu, dan (Kami ciptakan pula) makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rezekinya.”⁴⁸

Lingkungan hidup sebagai sumber daya mempunyai regenerasi dan asimilasi yang terbatas selama eksploitasi atau penggunaannya dibawah batas daya regenerasi atau asimilasi, maka sumber daya terbaharui dapat digunakan secara lestari. Akan tetapi apabila batas itu dilampaui, sumber daya akan mengalami kerusakan dan fungsinya sebagai faktor produksi dan konsumsi atau sarana pelayanan akan mengalami gangguan, sehingga manusia mempunyai tanggung jawab untuk memelihara dan memakmurkan alam sekitarnya serta menjaganya tetap lestari karena membuat kerusakan terhadap alam semesta dianggap sebagai sebuah kejahatan.⁴⁹ Sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an Asy-Syura ayat 183 :

⁴⁸ Qur'an Terjemahan.

⁴⁹ Otto Soemarwoto, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan* (Jakarta: Djambatan, 1997), h. 59.

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعَثُوا فِي الْأَرْضِ
مُفْسِدِينَ (الشُّرَاءُ : ٣٨١)

Artinya “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”.⁵⁰

Islam memberikan kebebasan kepada setiap pemilik hak untuk mempergunakan haknya sesuai dengan kehendaknya, selagi tidak bertentangan dengan syariat Islam. Pemilik hak dilarang menggunakan haknya untuk hal-hal yang dilarang oleh syara’ seperti menggunakan haknya tetapi merusak lingkungan atau alam.

Kebebasan menggunakan hak dibatasi oleh hal yang tidak bertentangan dengan syara’ dan tidak melanggar hak atau merugikan orang lain. Prinsip perlindungan hak serta kebebasan dalam menggunakan hak pribadi harus sejalan dan seimbang dengan perlindungan hak orang lain terutama perlindungan hak masyarakat umum. Penggunaan hak secara berlebihan yang menimbulkan pelanggaran hak dan kerugian terhadap kepentingan orang lain atau terhadap hak masyarakat umum dalam hukum islam disebut *ta’assul*

⁵⁰ Qur’an Terjemahan.

fi isti'mal al-haq (sewenang-wenang dalam menggunakan hak).⁵¹

Menurut para fuqaha keharaman *ta'assul fi isti'mal al-haq* disebabkan oleh dua hal yaitu:

- a. Setiap orang dilarang menggunakan haknya secara sewenang-wenang, sehingga membawa madharat bagi orang lain. Oleh karena itu, penggunaan hak dalam syari'at Islam tidak bersifat mutlak tetapi dibatasi dengan tidak membawa madharat kepada orang lain baik perorangan maupun masyarakat.
- b. Penggunaan hak-hak pribadi tidak hanya untuk kepentingan pribadi saja. Tetapi juga harus mendukung hak-hak masyarakat, karena kekayaan yang dimiliki seseorang merupakan bagian dari kekayaan seluruh manusia. Hak-hak pribadi boleh diambil atau dikurangi untuk membantu hak-hak masyarakat seperti, zakat, pajak, shadaqah dan lain-lain.⁵²

Dalam Hukum Islam membeda kan hak menjadi dua yaitu sebagai berikut

- a. Hak Allah yaitu hak yang kemanfaatannya ditujukan untuk melindungi kepentingan umum. Hal ini disandarkan dengan asma Allah karena

⁵¹Wahbah al-zuhayli, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, juz 4 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 29.

⁵² Fathi al-Duraini, *at-Tasauf fi Isti'mak al-haq* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1997), h. 60.

kemanfaatannya yang sangat besar untuk melindungi kepentingan publik. Hak Allah dibagi menjadi beberapa macam yaitu: Pertama, Ibadah murni (Iman kepada Allah, shalat, puasa dan lain-lain). Kedua, Hukuman murni (pencuri, pezina dan lain-lain). Ketiga, Hukuman terbatas yaitu hilangnya hak mewarisi harta orang yang dibunuh bagi pembunuh. Keempat, ibadah yang mengeluarkan harta benda (zakat dan haji). Kelima, Hak asli yang tidak tergantung kepada suatu kewajiban yang harus ditunaikan.⁵³

- b. Hak Manusia adalah yang ditujukan untuk melindungi kepentingan manusia secara individu sebagai pemilik hak. Pelanggaran terhadap hak-hak manusia ini memiliki beberapa hukuman yang bersifat: Pertama, Adanya pemaafan yaitu pembebasan atau pengguguran serta perdamaian dari pihak-pihak yang bersangkutan. Kedua, Hak penuntutan kepada pihak korban. Ketiga, Hukuman dapat bertambah apabila perbuatan pidana berulang. Keempat, Hukuman budak sama dengan hukuman orang merdeka. Kelima, berlaku cecara turun temurun kepada pihak korban.

⁵³Wahbah al-Zuhayly,..... h.13.

5. Hak Kepemilikan Sumber Daya Alam

Hak kepemilikan ini merupakan hubungan antara manusia dengan harta yang ditetapkan oleh syara', dimana manusia mempunyai kewenangan khusus untuk melakukan transaksi terhadap harta tersebut selama tidak ditemukan larangannya. Secara terminology hak milik adalah pengkhususan seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkannya untuk bertindak hukum terhadap benda tersebut (sesuai dengan keinginannya) selama tidak bertentangan dengan syara'. Oleh karena itu kepemilikan dapat diartikan sebagai kepemilikan harta yang didasarkan kepada agama. Manusia itu sendiri tidak mempunyai hak mutlak untuk mempergunakan kepemilikan tersebut, melainkan harus sesuai dengan aturan syara' sebagai batasan.⁵⁴ Adapun prinsip dasar hak milik dalam islam yaitu sebagai berikut:

- a. Pemilik mutlak, alam semesta ini adalah milik Allah SWT. Oleh sebab itu pemanfaatan dan pengelolaan alam semesta harus tunduk dengan ketentuan yang digariskan oleh Allah SWT.
- b. Manusia sebagai pemilik terbatas oleh Allah atas alam semesta. Oleh karena itu kepemilikan dan cara pemanfaatannya telah ditentukan olehNya. Hal

⁵⁴*Ibid*, h. 57.

tersebut memiliki beberapa konsekuensi: Pertama, Hak milik bukan merupakan sesuatu yang permanen atau berlaku secara mutlak tetapi hak milik dapat berubah sesuai dengan ketentuan perubahan yang diatur oleh syara'. Kedua, kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan dalam hak milik yaitu antara hak dan kewajiban merupakan sebuah konsekuensi logis, sehingga keduanya harus dilakukan.

- c. Allah SWT menciptakan alam semesta bukan untuk diriNya sendiri melainkan untuk kepentingan sarana hidup (wasilah al-hayah) bagi seluruh makhluk (alam semesta dan isinya) agar tercapai kemakmuran dan kesejahteraan hidup.
- d. Manusia harus mempertanggung jawabkan penggunaan hak milik terbatas tersebut kepada Allah SWT kelak di akhirat.

Adapun macam-macam kepemilikan yaitu sebagai berikut :

- a. Kepemilikan Individu (*al-milkiyyah al-fardiyyah//private property*) yaitu kekayaan yang dapat dimiliki oleh setiap individu masyarakat melalui sebab-sebab kepemilikan yang diisyaratkan oleh Allah seperti pemberian harta negara kepada rakyatnya. Kepemilikan pribadi merupakan ketentuan hukum syara' yang berlaku bagi zat

maupun kegunaan tertentu, yang memungkinkan pemiliknya untuk memanfaatkan barang tersebut. Ibnu Taimiyah mengatakan memberikan penghargaan tertinggi atas hak individu dalam kegiatan ekonomi, kemudian menegaskan batasan-batasannya yaitu dengan tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak menimbulkan kerugian bagi dirinya maupun orang lain.⁵⁵

- b. Kepemilikan Umum (*al-milkiyyah al-'amah/public property*) artinya atas ijin syara' kepada suatu masyarakat untuk bersama-sama memanfaatkan suatu benda. Kepemilikan umum ini dimungkinkan dalam islam apabila suatu benda pemanfaatannya diperuntukkan bagi masyarakat umum dimana masing-masing saling membutuhkan. Kepemilikan umum ini seperti hasil tambang, minyak, gas, listrik, air, hasil hutan dan lain-lain.⁵⁶
- c. Kepemilikan Negara (*milkiyyah al-dawwlah/state property*) yaitu harta yang merupakan hak bagi seluruh rakyat dan pengelolaannya menjadi wewenang negara, dimana negara berhak memberikan atau mengkhususkan kepada sebagian rakyat sesuai dengan ijtihad. Makna pengelolaan

⁵⁵ Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), h. 68.

⁵⁶ Adb al-Rahman al-Maliki, *Politik Ekonomi Islam* (Bangil: al-Izzah, 2001), h. 91.

oleh negara ini adalah adanya kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah untuk mengelolanya. Adapun kepemilikan negara ini meliputi semua jenis harta benda yang tidak dapat digolongkan kedalam jenis harta milik umum akan tetapi bisa digolongkan kedalam jenis harta milik individu. Harta milik negara ini juga merupakan hak milik umum, tetapi hak pengelolaannya menjadi wewenang pemerintah. Dengan demikian cakupan keumuman hak milik yang dapat dikuasai oleh pemerintah ini lebih luas daripada sekedar hak umum dalam penjelasan diatas. Artinya seluruh rakyat dalam suatu negara yang wewenang pengelolaannya ada ditangan pemerintah. Akan tetapi hak milik negara ini dapat dialihkan menjadi milik individu jika memang kebijakan negara demi kemaslahatan yang lebih luas.⁵⁷

6. Hak Pemanfaat Sumber Daya Alam Dalam Islam

Sumber daya alam dalam pengertian umum yaitu sebagai suatu yang dipandang memiliki nilai ekonomi. Dapat juga dikatakan bahwa sumber daya alam adalah komponen dari ekosistem yang menyediakan barang dan jasa yang bermanfaat bagi

⁵⁷ M.B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h. 110-111.

kebutuhan manusia.⁵⁸ Sumber daya alam seperti air, udara, lahan minyak, ikan hutan, dan lain-lain, merupakan sumber daya yang esensial bagi kelangsungan hidup manusia. Hilangnya atau berkurangnya ketersediaan sumber daya alam seperti tercemarnya air sehingga susah mendapatkan air bersih, rusaknya lahan karena pertambangan akan berdampak besar pada kelangsungan hidup manusia. Pengelolaan sumber daya alam yang baik akan meningkatkan kesejahteraan umat manusia, namun sebaliknya pengelolaan sumber daya alam yang tidak baik akan berdampak buruk bagi lingkungan hidup. Oleh karena itu, persoalan mendasar dalam pengelolaan sumber daya alam adalah bagaimana mengelola sumber daya alam tersebut agar mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi manusia dengan tidak mengorbankan lingkungan hidup maupun kelestarian sumber daya alam itu sendiri.⁵⁹

Pemanfaatan sumber daya alam yang ada di alam ini harus dikelola dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan, artinya memanfaatkan sumber daya alam seperlunya dengan tidak mengeksploitasi yang bisa menyebabkan kerusakan lingkungan.

⁵⁸ Ulfah Utami, *Konservasi Sumber Daya Alam* (Malang: UIN Malang press, 2008), h. 6.

⁵⁹ Akhmad Fauzi, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan* (Jakarta: Gramedia, 2010), h. 2.

Disamping itu manusia juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhinya yaitu menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem dan tidak membuat kerusakan-kerusakan baik terhadap binatang, tumbuh-tumbuhan maupun jenis-jenis makhluk lain. Pemanfaatan sumber daya alam menurut al-Qur'an berdasarkan materinya diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Pemanfaatan sumber daya laut

Laut merupakan salah satu bagian dari wilayah bumi yang dianugerahkan oleh Allah kepada manusia yang didalamnya mengandung aneka sumber daya laut yang sangat bernilai untuk dieksplorasi, dikelola, dan dimanfaatkan seoptimal mungkin demi memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Laut sebagai aset publik yang tidak bisa dikuasai oleh individu. Oleh karena itu membutuhkan peran negara dalam pengelolaan potensi kelautan sehingga dapat menompang perekonomian nasional. Ragam pemanfaatan potensi laut sebagaimana diinformasikan dalam ayat-ayat al-Qur'an tentang ragam potensi sumber daya laut, diantaranya yaitu : sebagai sumber pangan, sumber energi, tambang, mineral dan sebagai sarana transportasi.

b. Pemanfaatan sumber daya air

Air sebagai sumber kehidupan menjadi kebutuhan pokok manusia, tanpa air manusia, hewan dan tumbuhan tidak dapat bertahan hidup karena air adalah materi yang paling vital dalam kehidupan semua makhluk. Seperti firman Allah SWT dalam surat Al-Anbiya ayat 30 berikut :

أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا^ط وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ
شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ (الانبياء : ٣٠)⁶⁰

Artinya : ”Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya; dan Kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman?.”

Pada dasarnya air adalah kekayaan yang mahal dan berharga. Akan tetapi, karena Allah SWT menyediakannya begitu melimpah, baik di laut, di sungai bahkan melalui hujan berakibat pada kurangnya manusia menghargai air sebagaimana

⁶⁰ Qur'an Terjemahan.

mestinya. Hal ini terlihat dari tindakan penggunaan dan pencemaran air yang tidak terkendalikan. Seperti pencemaran limbah industri, zat beracun mematikan, zat kimia dll. Hal ini dapat membahayakan umat manusia dan makhluk hidup lainnya.⁶¹

Manfaat air secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi empat bagian yaitu :

1. Air digunakan untuk bersuci dan kebutuhan kebersihan. Bersuci dalam arti umum yaitu dimanfaatkan untuk membersihkan diri, mandi, mencuci pakaian, dan membersihkan benda-benda lahiriyah yang terlihat kotor, sedangkan dalam arti agamis air bisa membersihkan jiwa dan kekotoran jiwa batin dengan wudhu dan mandi junub.⁶²
2. Air dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pokok makhluk hidup (manusia, hewan, dan tumbuhan).
3. Air sebagai sarana irigasi untuk mengairi lahan pertanian. Selain untuk memenuhi kebutuhan bersuci dan minuman manusia dan makhluk

⁶¹ Yusuf Al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan* (Jakarta Timur: Al-Kausar, 2001), h. 153.

⁶² Kementerian Agama RI. *Tafsir Al-Qur'an Tematik Pelestarian Lingkungan Hidup* (Jakarta: PT.Sinergi Pustaka Indonesia, 2009), h. 89.

hidup air juga berperan penting dalam ketahanan pangan pertanian

4. Air dimanfaatkan sebagai sumber energi. Air bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik. Sumber daya air menyediakan berbagai manfaat yang dibutuhkan oleh masyarakat jika dikelola dengan baik.

c. Manfaat sumber daya angin

Dalam al-Qur'an angin adalah udara yang bergerak akibat adanya perbedaan tekanan udara dengan arah aliran angin dari tempat yang bertekanan rendah atau dari daerah yang memiliki suhu atau temperatur wilayah beruhu tinggi.⁶³ Beberapa manfaat udara dijelaskan dalam al-qur'an diantaranya :

1. Angin sebagai salah satu sumber energi
2. Angin sebagai pembibit alami artinya angin bisa melakukan penserbukan tanaman dengan alami tanpa bantuan manusia dan mengawinkan satu bibit tanaman dengan tanaman lain yang bermanfaat untuk manusia tanpa bantuan tangan manusia

⁶³*Ibid*, h. 100.

d. Manfaat sumber daya flora dan vegetasi

Tumbuhan dan pepohonan merupakan penghuni bumi pertama dalam sejarah penemuan manusia, ahli sejarah memperkirakan bahwa pepohonan dan tumbuhan telah ada jauh sebelum adanya manusia dan hewan. Tumbuh-tumbuhan merupakan sumber daya alam yang tidak kalah pentingnya dengan sumber daya alam air dan hewan, karena tumbuh-tumbuhan ini merupakan sumber makanan bagi kehidupan manusia dan hewan. Seperti firman Allah SWT dalam surat Al-An'am ayat 99 berikut :

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ
 نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا
 مُتَرَكَبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ
 وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ
 مُتَشَبِهٍ^{٢٤} أَنْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ^ج إِنَّ فِي
 ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (الانعام : ٩٩)

*Artinya : "Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan maka Kami keluarkan dari tumbuhan-tumbuhan itu tanaman yang menghijau, dan Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak. Dan dari manyang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (Kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah, dan (perhatikan pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman."*⁶⁴

e. Pemanfaatan sumber daya fauna

Binatang sebagai sumber daya mempunyai peran yang sangat penting dalam kelangsungan hidup di bumi seperti halnya tumbuhan, karena binatang merupakan unsur penting dalam rantai makanan. Jika binatang punah maka salah satu unsur rantai makanan terputus dan terjadi ketidak seimbangan dalam kehidupan bumi. Kedudukan alam ini mempunyai peran penting dalam

⁶⁴ Qur'an Terjemahan.

penyelenggaraan alam yang harmonis. Dalam kehidupan yang alami masing-masingnya mempunyai peran interaktif terhadap kelestarian ekosistem.

Islam memberikan pandangan bahwa semua yang ada di bumi adalah karunia yang harus dipelihara agar alam ini menjaga stabil. Allah SWT telah memberikan karunia yang besar kepada semua makhluk dengan menciptakan gunung, mengembangbiakkan segala jenis hewan. Seperti dalam firman Allah SWT dalam surat Luqman ayat 10 yang berbunyi :

خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ۚ وَأَلْقَىٰ فِي
الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ
دَابَّةٍ ۚ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن
كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ (لقمان : ١٠)⁶⁵

Artinya :”Dia menciptakan langit tanpa tiang sebagaimana kamu melihatnya dan Dia meletakkan gunung-gunung (di permukaan) agar ia (bumi) tidak menggoyangkan kamu; dan

⁶⁵ Qur'an Terjemahan.

memperkembangbiakkan segala macam jenis makhluk bergerak yang bernyawa di bumi. Dan Kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.”

Tanggung jawab manusia untuk menjaga kelangsungan makhluk hidup itu kiranya yang mendasari Nabi Muhammad SAW untuk mencadangkan lahan-lahan dalam kawasan lindung (dalam syariat dikenal dengan istilah hima), untuk tidak boleh digarap. Rasulullah mencadangkan hima semata-mata untuk menjaga ekosistem suatu tempat agar dapat terpenuhi kelestarian makhluk hidup yang hidup di dalamnya. Kemudian Rasulullah SAW juga melarang membunuh binatang dengan cara menganiaya yaitu dengan cara menahan (mengurung) dalam keadaan hidup kemudian melemparnya hingga mati. Nabi mmenganjurkan apabila akan menyembelih hewan harus menyembelihnya dengan pisau yang tajam agar tidak menyiksa serta menyebabkan hewan itu lama dalam keakitan.

Menurut Izz Al-Din Abd Al-Salam dalam kitab Qawaid al-Ahkam hak-hak hewan yang harus dilindungi oleh manusia adalah:

1. Menyediakan makan bagi mereka
2. Tidak menempatkan hewan bersama dengan segala sesuatu yang dapat melukainya
3. Menyembelih dengan adab baik
4. Memberikan kenyamanan pada tempat istirahat dan tempat minumnya
5. Menempatkan jantan dan betina pada satu tempat (bersama) pada musim kawin
6. Tidak boleh membuang hewan
7. Tidak boleh menembak hewan yang menyebabkan dagingnya tidak sah untuk dimakan⁶⁶

C. Tinjauan Pustaka

Penulis menguraikan beberapa penelitian terdahulu, terkait dengan skripsi penulis sebagai berikut :

1. Skripsi “Dampak Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 Terhadap pendapatan nelayan Kepiting dikelurahan nelayan Indah Kecamatan Medan Labuhan. Fokus penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dampak Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terhadap pendapatan nelayan Kepiting di Kelurahan nelayan Indah Kecamatan Medan Labuhan”.⁶⁷

⁶⁶ Fachruddin M. Mangunjaya, *Konservasi Alam Dalam Islam*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2005), h. 42.

⁶⁷ Repo.iain-tulungagung.ac.id

2. Skripsi “Perlindungan sumber daya perikanan untuk menjamin terwujudnya pembangunan perikanan berkelanjutan (Studi terhadap pelaksanaan perlindungan Lobster, Kepiting dan Rajungan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/MEN-KP/2016 tentang Penangkapan Lobster, Kepiting dan Rajungan) di Kabupaten Jepara. Dalam penelitian ini diterbitkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/MEN-KP/2016 dikarenakan keberadaan dan ketersediaan Lobster, Kepiting dan Rajungan telah mengalami penurunan populasi, sehingga perlu dilakukan pembatasan penangkapan terhadap ketiga jenis spesies tersebut”⁶⁸
3. Skripsi “Analisis Sadd Al-Dhari’ah dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2016 terhadap Praktik Penangkapan dan Penjualan Rajungan di Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban. Fokus penelitian pada skripsi ini yaitu bagaimana praktik penangkapan dan penjualan rajungan serta menganalisis Sadd al-dhari’ah dan PerMen Kp No 56 Tahun 2016 di Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban”.⁶⁹

⁶⁸ Idr,uin-antasari.ac.id

⁶⁹ Eprints.walisongo.ac.id

Fokus kajian-kajian karya ilmiah tersebut berbeda dengan fokus kajian dalam penelitian ini. Fokus penelitian ini yaitu untuk melihat Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020 Tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan Khusus Lobster Pespektif Hukum Islam (Studi di Tanjung Setia Kabupaten Pesisir Barat).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- al-Duraini, Fathi, *at-Tasauf fi Isti'mak al-haq*, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1997.
- Affandi, Muchtar, *Ilmu-ilmu Kenegaraan*, Bandung : Alumni, 1971.
- Al-Isfahani, Al-Raqib *Mufradat alfazh Al-Qur'an*, Bayrut: Dar al-Fikh, 1992.
- Al-Maliki Adb al-Rahman, *Politik Ekonomi Islam*, Bangil: al-Izzah, 2001.
- al-Zarqa' Mustafa Ahmad. *Al-Madkhal al-Fiqh al-Amm*, juz III, Beirut: Dar al-Fikri
- A. Mas'aid, Ghuftron, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Amiruddin dan Zainal Arifin Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- An-Nabhani, Taqiyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 2000.
- Anto, M.B. Hendrie, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Jakarta: RIneka Cipta, 2006.
- Ash-Shiddieqi, Muhammad Hasbi, *Sejarah dan Ilmu Pengantar Al-Qur'an/Tafsir*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet ke-12, 1998.
- Aziz, Abdul Majid, *Mu'jizat Al-Qur'an dan As-Sunnah Tentang Ilmu Pengetahuan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Azwar, Sarifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

- Dahuri, Rokhmin, *Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004.
- Djazuli, *Fiqh Siyasah "Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah"* Jakarta : Kencana, 2004.
- Fauzi, Akhmad, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, Jakarta: Gramedia, 2010.
- Hasan, Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- HD, Kaelany, *Islam dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- HR, Ridwan, *Fiqh Politik; Gagasan Harapan dan Kenyataan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- HS, Salim, *Hukum Pertambangan*, Jakarta: Sinar Grafindo, 2012.
- Ibrahim, Jindan Khalid, *Teori Politik Islam ; Telaah Krisis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam* Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta : Prenamedia Group, 2014.
- Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Manik,, Karden Eddy Sotang, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Djambatan, 2003.
- Maskoeri, Yasin, *Ilmu Alamiah Dasar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1986.
- Moh. Soerjani, Rofik Ahmad, dan Rozy Munir, *Lingkungan: Sumber Daya Alam Dan Kependudukan Dalam Pembangunan*, UI Press, 2008.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.

- Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Cet 1, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Munawir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawir*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Nawawi, M. Alwi, *Pengantar Hukum Agama Islam*, Makasar: Universitas Muslim Indonesia, 1998.
- Prodjodikiro, Wirjono, *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik*, Bandung : PT Eresco, 1971.
- Pulungan, Suyuti, *Fiqh Siyasah*, Jakarta : Raja Grafindo, 1994.
- Saifuddin, Anshari Ending, *Wawasan Islam “Pokok-pokok Pikiran Tentang Paradigma dan Sistem Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Salim, Emil, *Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi*, Jakarta: Kompas, 2010.
- Schalk, Louis Goot, *Understanding Story, A. Primer Of Histirical*, Terjemahan Nugroho Notosusanto, UI Press, 1995.
- Sirajuddin, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, STAIN Bengkulu: Pustaka Pelajar Offset, 2008.
- Soemarwoto, Otto, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Djambatan, 1997.
- Subagyo, Joko, *Hukum Lingkungan, Masalah dan Penanggulangan*, Jakarta : Rineka Cipta, 2002.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta PT Asdi Mahasatya, 2007.
- Susiadi, *Metode Penelitian*, Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.

Syahatah, Husain Husain, *Perlindungan Aset Publik Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005.

Usman, Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, 2002.

Utami, Ulfah, *Konservasi Sumber Daya Alam*, Malang: UIN Malang press, 2008.

Wahhab, Khallaf Abdul, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet. 1, alih bahasa Moh. Zuhri dan ahmad Qarib, Semarang : Dina Utama, 1994.

Washil, Nashr Farid Muhammad, Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, Terjemahan, Wahyu Setiawan, Jakarta: Amzah, 2009.

Peraturan Undang-Undangan

Kementerian Agama RI. *Tafsir Al-Qur'an Tematik Pelestarian Lingkungan Hidup*, Jakarta: PT.Sinergi Pustaka Indonesia, 2009.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp.*).

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Wawancara

Abror, Hasnul, Kepala Dinas Perikanan Pesisir Barat.

Bambang Purnama, wawancara dengan penulis., Nelayan di Pelabuhan pantai Tanjung Setia, 15 Januari 2020.

Efendy, M. Darwan, wawancara dengan penulis, Ruang kantor Kepala Desa Tanjung Setia, 13 Januari 2020.

Hakim, Rahman, wawancara dengan penulis, nelayan di Pantai Tanjung Setia, 17 Januari 2020.

Hanapi, wawancara dengan penulis., Nelayan di Pelabuhan pantai Tanjung Setia, 15 Januari 2020.

Hengki, wawancara dengan penulis., Nelaya di Pelabuhan pantai Tanjung Setia, 17 Januari 2020

Hidayat, Sunar, wawancara dengan penulis, nelayan di Pelabuhan Pantai Tanjung Setia, 17 Januari 2020.

Irawan, wawancara dengan penulis., Nelayandi Pelabuhan pantai Tanjung Setia, 15 Januari 2020.

Jumadi, wawancara dengan penulis., Nelayan di Pelabuhan pantai Tanjung Setia, 17 Januari 2020.

Mukhlazim, wawancara dengan penulis, Ruang Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Barat, 16 Januari 2020.

Rizkon, wawancara dengan penulis., Polsek Biha Pesisir Selatan, 15 Januari 2020.

Rohman, Ali, wawancara dengan penulis, nelayan di Pelabuhan pantai Tanjung Setia, 15 Januari 2020.

Roziyadi, wawancara dengan penulis., Nelayan di Pelabuhan pantai Tanjung Setia, 17 Januari 2020.

Yudi, wawancara dengan penulis., Nelayan di Pelabuhan pantai Tanjung Setia, 15 Januari 2020.

Zikri, wawancara dengan penulis., Nelayang di Pelabuhan pantai Tanjung Setia, 17 Januari 2020.

